

Upaya Tiongkok dalam Mengamankan Energi terhadap Vietnam (2014-2016)

Kerjasama Energi Tiongkok-Vietnam

Ismi Mujahidah Nur Said¹
Elistania²

Abstract

This study aims to describe the efforts of China in securing energy on Vietnam in the middle of South China Sea conflict. To analyze the issue, this study uses a liberal perspective. Periodization in this research between 2014 until 2016, when the level of intensity conflict has increased while President Xi Jinping issued the concept of the 21st Century Maritime Silk Road. This research is a qualitative research using international cooperation theory, energy security concept and complex interdependence theory. The theory of complex interdependence is the main frame of mind used by the author to analyze China's efforts in securing energy on Vietnam, while the concept of energy security and international cooperation theory is used as a supportive framework that illustrates the reasons for China's concept of the 21st Century Maritime Silk Road. The study results show that CIPEC is a Chinese effort to bind Vietnam to maintain its energy security. However, on the other hand CIPEC is a newly-issued initiative so it is still in the process of development so CIPEC has not been able to promise to improve Vietnam's infrastructure but CIPEC can encourage energy cooperation between China and Vietnam seen from the intensity of diplomatic meetings related to their energy cooperation.

Keywords: CIPEC, complex interdependence, energy cooperation, liberalism, south china sea

Pendahuluan

Energi telah menjadi salah satu elemen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap negara sejak berakhirnya Perang Dingin yang digunakan di hampir setiap sektor dan karenanya menjadi elemen terpenting yang mempengaruhi politik dan ekonomi global pada sistem internasional saat ini. Selain itu, energi menjadi salah satu elemen yang mendominasi dunia karena kekuatan ekonomi dan politik ditandai dengan sumber energi yang memadai. Oleh karena itu, kelangkaan sumber daya energi khususnya minyak dan gas akan menyebabkan ancaman bagi suatu negara dalam hal ekonomi, transportasi dan kebutuhan militernya.

Karena energi memainkan peran penting dalam semua aspek ekonomi modern dari transportasi hingga komunikasi, mulai dari perawatan kesehatan sampai sistem

¹ Mahasiswi, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. email: ismimujahidah97@gmail.com.

² Dosen Tetap, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

pertahanan nasional, maka ketergantungan pada energi dalam mendukung proyek dunia menciptakan kerentanan dan persaingan atas pasokannya dan memegang peranan penting dalam keamanan nasional setiap negara. Selain itu, karena pentingnya energi dalam pembangunan ekonomi sehingga keamanan energi terhubung dengan pembangunan socio-ekonomi suatu negara dan juga situasi energi berbeda di setiap negara, bahkan antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, upaya yang dipilih setiap negara mengenai kebijakan energinya pun berbeda.

Keamanan energi merupakan suatu keadaan dimana ketersediaan sumber energi yang ada tidak terputus dengan harga yang terjangkau (Azmi, 2014). Tolak ukur yang dipergunakan untuk menilai bahwa suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak. Dalam hal ini, ketahanan energi dianggap penting bagi suatu negara karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Hal ini dikarenakan segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi yang berakibat menurunkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan akan membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan oleh negara. Selain itu, keamanan energi digambarkan sebagai kondisi dimana suatu bangsa dan semua ataupun sebagian besar dari warganya maupun sektor industri memiliki akses pada sumber daya energi yang memadai pada masa sekarang hingga masa yang akan datang (Ozdamar, 2009).

Saat ini, Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian dunia internasional. Tiongkok mengalami pertumbuhan di hampir segala sektor pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Saat ini, Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Products) Tiongkok rata-rata 9,82% per-tahun pada rentang 1989-2016 (Hakans, 2016:2). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan jaminan pasokan energi yang semakin besar, karena itu hubungan antara energi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting bagi Tiongkok (Yi-Chong, 2006:267).

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, Tiongkok membutuhkan negara-negara tetangganya. Tiongkok tidak ingin terlalu bergantung pada minyak dari negara-negara Afrika atau Timur Tengah karena jarak tempuh yang terlalu jauh. Namun, saat ini Tiongkok mengimpor sekitar 1,15 juta barel minyak per hari dari Arab Saudi, 611.338 barel dari Iran, dan 695.148 barel dari Irak untuk memenuhi permintaan domestiknya. The International Energy Agency (IEA) memperkirakan konsumsi minyak Tiongkok akan meningkat menjadi 12,2 juta barel per hari pada tahun 2020. Dalam konteks ini, Vietnam yang memiliki sekitar 4,4 miliar barel cadangan minyak akan menjadi eksportir energi yang signifikan untuk Tiongkok (Nguyen, 2017).

Tetapi di sisi lain konflik di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok-Vietnam meningkat pada Mei 2014 karena Tiongkok memindahkan sebuah rig pengeboran minyak yang dimiliki oleh China National Petroleum Corporation di dekat kepulauan Paracel sehingga menimbulkan demonstrasi anti-Tiongkok di Vietnam (McKirdy, 2014). Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan penelitian "Bagaimana Upaya Tiongkok dalam Mengamankan Energi terhadap Vietnam Tahun 2014-2016?"

Pembahasan

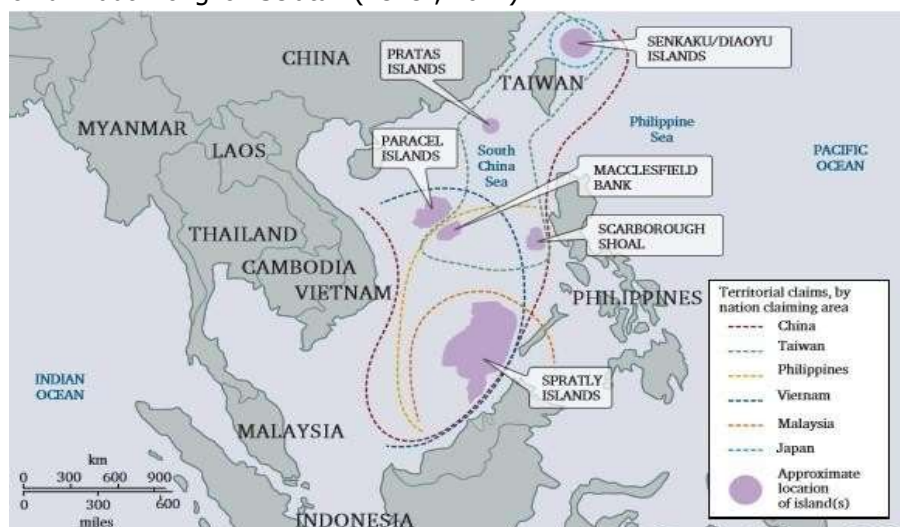
Upaya Tiongkok dalam mengamankan energi terhadap Vietnam adalah dengan membentuk CIPEC. CIPEC merupakan upaya Tiongkok dalam mengikat Vietnam untuk menjaga keamanan energinya. Tetapi, di sisi lain CIPEC merupakan inisiasi yang baru dikeluarkan jadi masih dalam proses pembangunan sehingga CIPEC belum dapat menjanjikan akan memperbaiki infrastruktur Vietnam tetapi CIPEC dapat mendorong kerjasama energi antara Tiongkok-Vietnam dilihat dari intensitas pertemuan diplomatik

terkait kerjasama energi keduanya. Tetapi di sisi lain, Tiongkok-Vietnam perlu menghadapi sengketa teritorial keduanya di Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok-Vietnam dalam Konflik di Laut Tiongkok Selatan

Posisi Tiongkok mengenai kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan mengklaim kepulauan Paracel (Xisha) dan Spratly (Nansha) sejak Juni 2000 diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, klaim Tiongkok didasarkan pada beberapa faktor, termasuk bukti sejarah, pengembangan ekonomi, administrasi yang efektif, dan pengakuan internasional (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2000). Bentrok antara Tiongkok dan Vietnam di tahun 1974 berakhir dengan Tiongkok merebut kekuasaan Vietnam di kepulauan Paracel.

Kedua negara kembali bentrok di tahun 1988 memperebutkan kepulauan Spratly. Kemudian pada 2012, terjadi sengketa antara Tiongkok dan Vietnam mengenai eksplorasi energi di Laut Tiongkok Selatan. Vietnam menuduh sebuah kapal nelayan Tiongkok memotong kabel seismik yang terpasang pada salah satu pelautnya yang mengeksplorasi minyak dan gas di dekat Teluk Tonkin. Kemudian Vietnam mengirimkan patroli baru yang mencakup polisi laut untuk mencegah aktivitas kapal perikanan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Perlez, 2012).



Gambar 1.1 Peta Perselisihan Klaim Wilayah di Laut Tiongkok Selatan
Sumber: Kun-Chin Lin, Maritime Security in the Asia Pacific, Research Paper, 2015, Hal. 6

Upaya Tiongkok dalam Mengamankan Energi terhadap Vietnam (2014-2016) Kerjasama Energi Tiongkok-Vietnam

Penulis melampirkan peta perselisihan klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan di mana lingkup klaim Tiongkok ditandai dengan garis merah, lingkup klaim Taiwan ditandai dengan garis hijau tua, lingkup klaim Filipina ditandai dengan garis kuning, lingkup klaim Malaysia ditandai dengan garis oranye, lingkup klaim Vietnam ditandai dengan garis biru tua, serta lingkup klaim Jepang ditandai dengan garis hijau muda. Dari sini terlihat bahwa klaim tumpang tindih antara Tiongkok-Vietnam terjadi di Kepulauan Paracel dan Spratly.

Pada 2013, Vietnam menghabiskan \$ 3.4bn (£ 2.2bn) untuk pertahanan guna mempertahankan kedaulatannya. Vietnam berusaha untuk meningkatkan pertahanan udaranya dengan mengakuisisi jet tempur dan pesawat tak berawak. Saat ini Vietnam telah memiliki pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 Rusia tetapi Vietnam masih

membutuhkan peningkatan pada angkatan udaranya. Meskipun Vietnam telah sadar bahwa militernya akan selalu kalah jumlah oleh Tiongkok, angkatan laut dan angkatan udara yang kuat akan memberikan cukup pencegahan (Holmes, 2015).

Pada 2014, Hubungan Tiongkok-Vietnam sempat mengalami penurunan karena masalah pemindahan rig pengeboran minyak yang berefek pada demo anti-Tiongkok di Vietnam. Demonstrasi ini menjadi demonstrasi terburuk sejak normalisasi hubungan kedua negara, selama seminggu puluhan ribu masyarakat Vietnam membakar pabrik-pabrik asing di Vietnam Selatan yang menyebabkan sebagian besar warga Tiongkok di Vietnam mengungsi ke Kamboja karena cemas akan keselamatan. Selain itu, karena demonstrasi tersebut beberapa pabrik asing di Vietnam menghentikan produksi barang sebagai tindakan pencegahan (Mogato, 2014).

Dampak atas demonstrasi tersebut ialah menurunnya angka wisatawan Tiongkok ke Vietnam. Vietnam kedatangan lebih dari 674.000 turis asing pada Mei yang turun hampir 10 persen dari April, data dari Vietnam National Administration of Tourist (VNAT) penurunan tajam adalah dari pendatang Tiongkok. Penurunan ini juga mengakibatkan penurunan 80 persen pendapatan beberapa perusahaan perjalanan lokal, karena turis Tiongkok membatalkan tur ke Vietnam. Huong Giang Travel Company di Hanoi juga menyebutkan bahwa perusahaannya dalam masalah karena 20 persen dari penjualannya berasal dari turis Tiongkok dan belum menerima pemesanan sejak Mei. Beberapa hotel di Vietnam juga mengalami penurunan. Salah satunya, Hotel Nhat Thao di daerah backpacker di Kota Ho Chi Minh yang menyebutkan bahwa belum pernah kedatangan pengunjung dari Tiongkok sejak Mei (Ives, 2014).

Selanjutnya Vietnam bersama Filipina mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase meminta agar Tiongkok menetapkan yurisdiksinya, memberikan penghormatan terhadap hak dan kepentingan Vietnam di Kepulauan Spratly dan Paracels serta di ZEE dan landas kontinennya, juga menyatakan bahwa klaim 9-dashed lines tanpa dasar hukum. Pengajuan Vietnam merupakan respon atas keputusan Tiongkok yang menerbitkan sebuah makalah pada 7 Desember 2014 yang berisi tentang posisinya di Laut Tiongkok Selatan (Thayer, 2014).

Kerjasama Energi Tiongkok-Vietnam

Pada 2007, Tiongkok dan Vietnam kembali sepakat untuk melanjutkan kerjasama keduanya di bidang infrastruktur, pengembangan energi, dan telekomunikasi. Kedua negara sadar akan kedekatan geografis mereka, sehingga akan lebih baik jika memiliki hubungan bilateral yang baik pula. Selanjutnya pada 2011, Tiongkok dan Vietnam menandatangani "Rencana Perdagangan Lima Tahun" dan "Kerjasama Ekonomi antara Tiongkok dan Vietnam pada 2012-2016" yang didalamnya juga berisi kerjasama energi antara kedua negara.

Dalam bidang kerjasama energi, kedua negara melakukan perdagangan tenaga listrik, memperkuat sumber daya pembangkit listrik tenaga air dengan melakukan kerjasama dalam pengembangan, proyek rekayasa tenaga listrik, dan membangun jaringan transmisi multinasional. Kedua negara juga memperkenalkan konstruksi jalan raya dan kereta cepat pada zona kerjasama ekonomi regional Two Corridors and One Economic Circle (Hui, 2017). Kemudian pada 2014 Vietnam mendirikan Vinasolar yang merupakan perusahaan energi surya Vietnam di Tiongkok serta bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Selain itu, perusahaan ini juga mendorong kerjasama bilateral dalam energi terbarukan dan memperbaiki sektor lingkungan kedua negara (Hong'e, 2017).

Pada 2015, Tiongkok dan Vietnam menandatangani sejumlah dokumen kerjasama yang mencakup bidang transportasi, kapasitas produksi, jalur kereta cepat, energi,

perekonomian dan urusan daerah. Saat ini, kedua negara memperluas kerjasama dalam kerangka OBOR Tiongkok dan rencana Two Corridors and One Economic Circle serta meningkatkan kerjasama kapasitas produksi. Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan kompleks pembangkit listrik tenaga batu bara 6.224 megawatt di provinsi Binh Thuan, Vietnam.

Pembangunan vinh tan 1 thermal power plant yang dimulai pada Juli 2015 terdiri dari 2 unit, unit 1 dijadwalkan selesai pada akhir 2018 dan unit 2 pada awal 2019 (Junmian, 2017). Vinh tan 1 dibangun untuk membantu mengurangi ketergantungan kawasan ini pada pembangkit listrik tenaga air terutama di musim kemarau atau selama musim kering. Sedangkan, untuk pembangunan vinh tan 2 sudah selesai dibangun sejak 2014. Selanjutnya pada November 2015, Vietnam menandatangani MOU dengan China Development Bank Corporation (CDB) mengenai proyek pembangunan vinh tan 3 pembangkit tenaga batu bara. Dengan stasiun pembangkit terletak di dekat kota Ho Chi Minh akan menjadi kontributor utama pertumbuhan pasokan listrik di Vietnam Selatan dan menjadi sumber penting penyelesaian Vietnam dengan Vietnam Selatan. Operasi komersial unit pertama ditargetkan pada 2020 (CLP Holdings Limited, 2015). Sedangkan untuk pembangunan vinh tan 4 dibiayai oleh Korea Selatan dan Jepang.

Kemudian pada Desember 2016, Electric Power Planning & Engineering Institute (EPPEI)³ menyelenggarakan simposium penelitian perencanaan kerjasama energi Tiongkok-Vietnam di Beijing. Selama simposium tersebut, EPPEI memperkenalkan latar belakang proyek dan rencana kerja terkait perencanaan kerjasama energi Tiongkok-Vietnam. EPPEI sedang melakukan penelitian perencanaan kerjasama energi Tiongkok-Vietnam. Penelitian ini merupakan tindakan penting untuk menerapkan strategi penyebaran kerjasama energi dari inisiatif OBOR Tiongkok serta mempromosikan kerjasama di sektor energi antara Tiongkok dan Vietnam (CEEC Energy China, 2016).

Kerjasama Energi Tiongkok-Vietnam melalui China-IndoChina Peninsula Economic Corridor (CIPEC)

Pada 26 Mei 2016 mulai dikeluarkan rancangan pembangunan CIPEC pada Forum Kerjasama Ekonomi Teluk Pan-Beibu kesembilan (Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative, 2017: 15). CIPEC dimulai dari Delta Sungai Mutiara Tiongkok ke barat sepanjang jalan Nanchong-Guang'an dan juga menyediakan kereta api berkecepatan tinggi Nanning-Guangzhou melalui Nanning dan Pingxiang ke Hanoi dan Singapura. Jembatan darat ini menghubungkan Tiongkok dengan Semenanjung Indo-Tiongkok dan melintasi pusat kota Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar dan Malaysia. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kerja sama Tiongkok dengan negara-negara ASEAN.

Tiongkok dan Semenanjung IndoTiongkok dihubungkan oleh darat dan laut dengan ikatan geografis, budaya, dan masyarakat yang peduli satu sama lain. Semenanjung IndoTiongkok merupakan jaringan penting pada OBOR Tiongkok. Proyek CIPEC bertujuan untuk menghubungkan kota-kota dengan jaringan perkeretaapian dan jalan raya untuk memudahkan arus manusia, barang, modal dan informasi. Ini juga akan membuka peluang baru untuk kerjasama strategis, dan menciptakan ekonomi regional dan pembangunan daerah yang lebih baik.

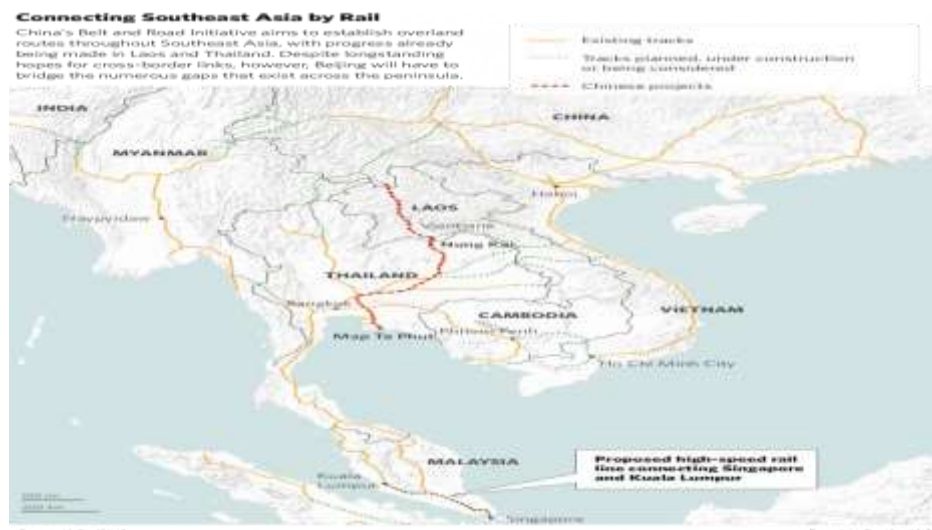
CIPEC bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara Greater Mekong Subregion (GMS) yang meliputi Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam khususnya dengan mengembangkan transportasi (jalan raya, kereta api dan

³ Organisasi yang berpartisipasi memperkenalkan status kerjasama energi Tiongkok di Vietnam termasuk kemajuan implementasi, kesulitan yang ada dan proyek-proyek yang direncanakan, serta usulan usulan untuk perencanaan dan studi kebijakan.

konektivitas di udara). Inisiatif ini akan mendukung perdagangan antara Tiongkok dan anggota ASEAN yang sudah terikat oleh sebuah perjanjian perdagangan bebas sejak 2010. Di Tiongkok, provinsi Yunnan dan Guangxi adalah yang paling terlibat dalam kerjasama ini (Asian Development Bank, 2011:2).

Terdapat 3 jalur transportasi yang menghubungkan CIPEC, yakni: darat, laut, dan udara. Di rute darat ada sembilan jalan yang menghubungkan potongan GMS, yakni East-West Economic Corridor yang menghubungkan India-Myanmar-Thailand, North-South Economic Corridor yang menghubungkan Laos-Thailand dan Southern Economic Corridor yang menghubungkan Thailand-Vietnam serta akan membentuk pusat infrastruktur transportasi GMS. Ketiga koridor ekonomi utama ini akan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan perdagangan, investasi dan peluang ekonomi lainnya dari negara-negara GMS

Hingga saat ini telah dibangun 6 jalan raya, 2 kereta api, 3 saluran air, 2 jaringan pipa minyak dan gas, 8 saluran informasi, 15 pelabuhan, dan 2 stasiun kereta api di Koridor Ekonomi Semenanjung China-Indochina. Namun, kondisi infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang jelas terlihat di berbagai negara ASEAN (Dongsheng, 2016).



Gambar 3.1 Rencana Pembangunan Jalur Kereta di Asia Tenggara

Sumber: "Southeast Asia: A Notch in China's Belt and Road Initiative", diambil dari <https://worldview.stratfor.com/article/southeast-asia-notch-chinas-belt-and-road-initiative>

Jalur yang sudah dibangun oleh negara-negara GMS ditandai dengan garis oranye dan jalur yang sedang dalam proses pembangunan ditandai dengan garis hijau. CIPEC merupakan salah satu koridor ekonomi di bawah naungan inisiasi BRI Tiongkok yang saat ini merupakan koridor ekonomi terpanjang dengan potensi terbesar di dunia, secara langsung mempengaruhi 4,4 miliar orang atau sekitar 63% dari populasi dunia dan mempengaruhi ekonomi sebesar \$ 21 triliun atau sekitar 29% dari volume global. Selain itu, inisiasi BRI Tiongkok berusaha untuk memperbaiki posisi geo-strategis Tiongkok di dunia (NDRC People's Republic of China, 2015). Inisiasi BRI Tiongkok memiliki lima bidang utama kerjasama, yakni kebijakan komunikasi, konektivitas jalan, perdagangan tanpa hambatan, peredaran uang dan pemahaman budaya.

Inisiasi BRI Tiongkok akan menerima anggaran dari 7 pemodal, yakni Silk Road Fund, AIIB, BRICS Bank, dan SCO Development Bank dengan dukungan politik dan keuangan penuh dari pemerintah Tiongkok, inisiasi BRI Tiongkok telah menjadi salah

satu tugas utama dalam diplomasi Tiongkok untuk secara komprehensif mempromosikan strategi ini. Inisiasi BRI Tiongkok diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah kurang berkembang di Tiongkok untuk mempersempit kesenjangan pendapatan antardaerah. Selain itu, inisiasi ini bisa menjadi peluang investasi luar negeri yang sangat baik untuk sektor swasta Tiongkok.

China-IndoChina Peninsula Economic Corridor (CIPEC) sebagai Faktor Pendorong Kerjasama Energi Tiongkok-Vietnam

Sebelumnya Tiongkok telah membangun koridor ekonomi dengan Pakistan yang disebut China Pakistan Economic Corridor (CPEC), dilihat dari koridor tersebut yang telah berhasil mempererat hubungan Tiongkok-Pakistan. Oleh karena itu, Tiongkok mencoba melakukan hal yang sama pada koridor ekonomi semenanjung Indo-Tiongkok. CIPEC tidak hanya menjadi sebuah jembatan antara hubungan Tiongkok-Vietnam tetapi juga sebagai bentuk kerjasama energi antara kedua negara tersebut seperti asumsi dari complex interdependence bahwa dalam Hubungan Internasional, arti dari kekuatan suatu negara sudah berbeda.

Kekuatan militer tidak relevan dalam menyelesaikan ketidaksepakatan mengenai masalah ekonomi di antara dua negara. Hubungan saling pengaruh yang saling menguntungkan mungkin ada namun kekuatan militer tidak lagi dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencapai tujuan lain seperti kesejahteraan ekonomi dan ekologi, karena sebagian besar dampak kekuatan militer sangat mahal dan tidak pasti. Seperti yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam dengan memperkuat kerjasama energi, keduanya berusaha menyelesaikan atau setidaknya mencoba untuk menurunkan skala konflik di Laut Tiongkok Selatan (Hui, 2017).

Vietnam adalah salah satu negara bagian dari BRI Tiongkok. Perkembangan lingkungan ekonomi di Vietnam dengan peningkatan jumlah manufaktur dan sumber daya alam yang melimpah membuat Vietnam menjadi alasan ketertarikan Tiongkok.

Kesimpulan

Kerjasama energi antara Tiongkok-Vietnam mulai disepakati kembali sejak 2007 karena kedua negara sadar akan kedekatan geografis mereka, sehingga akan lebih baik jika memiliki hubungan bilateral yang baik pula. Selanjutnya momentum kerjasama keduanya terlihat pada 2015, ketika Tiongkok memulai pendekatan ke Vietnam terkait konsep the 21st Century Maritime Silk Road dengan meningkatkan pembangunan kompleks pembangkit listrik tenaga batubara 6.224 megawatt di provinsi Binh Thuan, Vietnam.

The 21st Century Maritime Silk Road di bawah naungan inisiasi BRI Tiongkok saat ini merupakan koridor ekonomi terpanjang yang memiliki potensi terbesar di dunia, secara langsung mempengaruhi 4,4 miliar orang atau sekitar 63% dari populasi dunia dan mempengaruhi ekonomi sebesar \$ 21 triliun atau sekitar 29% dari volume global. Selain itu, inisiasi BRI Tiongkok berusaha untuk memperbaiki posisi geo-strategis Tiongkok di dunia. Inisiasi BRI Tiongkok memiliki lima bidang utama kerjasama, yakni kebijakan komunikasi, konektivitas jalan, perdagangan tanpa hambatan, peredaran uang dan pemahaman budaya.

Kemudian pada 26 Mei 2016 mulai dikeluarkan rancangan pembangunan CIPEC pada forum kerjasama ekonomi Teluk Pan Beibu kesembilan. Dalam membangun CIPEC, Tiongkok akan mendukung kembali mekanisme kerjasama ekonomi negara GMS yang meliputi Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Sampai saat ini telah dibangun 6 jalan raya, 2 kereta api, 3 saluran air, 2 jaringan pipa minyak dan gas, 8 saluran informasi, 15 pelabuhan, 2 stasiun kereta api di CIPEC.

Dengan menggunakan complex interdependence, seperti yang disebutkan pada

salah satu aspek dalam complex interdependence bahwa terdapat kombinasi dua pandangan berlawanan, yaitu memadukan unsur-unsur politik kekuasaan dan liberalisme ekonomi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat hubungan interdependensi. Penulis mencocokkan dengan upaya yang dipilih Tiongkok dalam mengamankan energinya terhadap Vietnam walaupun terdapat konflik di Laut Tiongkok Selatan, sehingga membuktikan bahwa dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat hubungan interdependensi, suatu negara akan memadukan unsur politik kekuasaan dengan liberalisasi ekonomi.

Sepanjang sejarah, Laut Tiongkok Selatan telah menjadi bagian penting dari Jalur Sutra Maritim Abad 21 yang diusulkan oleh Tiongkok pada 2013. Masalah Laut Tiongkok Selatan saat ini menyebabkan serangkaian efek negatif pada BRI Tiongkok. Namun, efek negatifnya bersifat jangka pendek, terlokalisir, mudah diatur, dan tidak akan secara radikal menghambat Tiongkok dan ASEAN membangun BRI Tiongkok. Sebaliknya, BRI Tiongkok akan memberikan dampak perdamaian di Laut Tiongkok Selatan dan akan terus mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

Sebelumnya Tiongkok telah membangun koridor ekonomi dengan Pakistan yang disebut China Pakistan Economic Corridor (CPEC), dilihat dari koridor tersebut yang telah berhasil mempererat hubungan Tiongkok-Pakistan. Oleh karena itu, Tiongkok mencoba melakukan hal yang sama pada koridor ekonomi semenanjung Indo-Tiongkok. Upaya Tiongkok dalam memperkuat kerjasama energi terhadap Vietnam adalah dengan membentuk CIPEC.

CIPEC juga merupakan upaya Tiongkok dalam mengikat Vietnam untuk menjaga keamanan energinya. Tetapi, di sisi lain CIPEC merupakan inisiasi yang baru dikeluarkan jadi masih dalam proses pembangunan sehingga CIPEC belum dapat menjanjikan akan memperbaiki infrastruktur Vietnam tetapi CIPEC dapat mendorong kerjasama energi antara Tiongkok-Vietnam dilihat dari intensitas pertemuan diplomatik terkait kerjasama energi keduanya. Selain itu, Vietnam adalah salah satu negara bagian dari BRI Tiongkok. Perkembangan lingkungan ekonomi di Vietnam dengan peningkatan jumlah manufaktur dan sumber daya alam yang melimpah membuat Vietnam menjadi alasan ketertarikan Tiongkok. Tetapi sebaiknya Tiongkok juga memperhatikan hubungan antara wilayah utara dan selatan Vietnam yang secara historis telah diwarnai perang.

Referensi

- Asian Development Bank. (2011). The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program Strategic Framework 2012–2022.
- Azmi, Riza & Hidayat Amir. (2014). Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia.
- CEEC Energy China. (2016). Symposium on China-Vietnam Energy Cooperation Planning Research Held in Beijing. http://en.ceec.net.cn/art/2016/12/30/art_138_1292212.html.
- CLP Holdings Limited. (2015). CLP's Vietnamese Power Project Signs MoU for Investment and Financing.
- Dongsheng, Hu. (2016). Better coordination called for China-Indochina Peninsula Economic Corridor cons. <http://silkroad.news.cn/2016/0527/1438.shtml#>.
- Hakans, Eric. (2016). China's Challenge to the World Economic Order. ISS Risk Special Report.
- Holmes, Oliver. (2015). Vietnam sends message to China with bid to buy fighter jets and drones. <https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/vietnam-message-china-fighter-jets-drones-south-china-sea>.

- Hong'e, Mo. (2017). Solar energy cooperation with China thrives in Vietnam. <http://www.ecns.cn/business/2017/11-08/280114.shtml>.
- Hui, Lu. (2017). Spotlight: China, Vietnam agree to deepen partnership under new circumstances. http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/13/c_136747039.htm.
- Hui, Zhang. (2017). The Belt and Road Initiative Promises Huge Cooperation Space for China and Vietnam – Interview with the Chinese Ambassador to Vietnam, Hong Xiaoyong. http://www.chinatoday.com.cn/english/society/2017-06/08/content_741819.htm.
- Ives, Mike. (2014). China Tensions Choke Off Tourism to Vietnam. <https://www.nytimes.com/2014/07/22/business/international/china-tensions-choke-off-tourism-to-vietnam.html>.
- Junmian, Zhang. (2017). Vinh Tan 1 power plant largest Chinese investment in Vietnam. <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/home/rolling/20049.htm>.
- McKirdy, Euan & Zoe Li. (2014). Vietnamese protesters target Chinese embassy. <https://edition.cnn.com/2014/05/12/world/asia/south-china-sea-drilling-duplicate-2/index.html>.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2000). The Issue of South China Sea.
- Mogato, Manuel & Ho Binh Minh. (2014). Vietnam mobs set fire to foreign factories in anti-China riots. <https://www.reuters.com/article/us-china-vietnam/vietnam-mobs-set-fire-to-foreign-factories-in-anti-china-riots-idUSBREA4D04F20140514>.
- NDRC People's Republic of China. (2015). Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html.
- Nguyen, Quoc-Thanh. (2017). Vietnam's Energy Exports Could Help Rebuild Ties With China. <https://thediplomat.com/2017/03/vietnams-energy-exports-could-help-rebuild-ties-with-china/>.
- Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative. (2017). Building the Belt and Road: Concept, Practice and China's Contribution.
- Ozdamar, Ozgur. (2009). Energy, Security, and Foreign Policy. ISA Vol. 3. No. 81.
- Perlez, Jane. (2012). Dispute Flares Over Energy in South China Sea. <http://www.nytimes.com/2012/12/05/world/asia/china-vietnam-and-india-fight-over-energy-exploration-in-south-china-sea.html>.
- Thayer, Carl. (2014). Vietnam Files Statement of Interest with the Permanent Court of Arbitration. <https://www.cogitasia.com/vietnam-files-statement-of-interest-with-the-permanent-court-of-arbitration/>.
- Yi-chong, Xu. (2006). China's Energy Security. Australian Journal of International Affairs Vol 60.